

PENGARUH PENGGUNAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERHADAP KEMISKINAN DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019-2020

Sofa Sundarti¹ Mulyo Hendarto Robertus²

^{1,2}Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
sofasundarti@students.undip.ac.id

Abstract

Tujuan: *Poverty is a problem faced by all countries. Both developed countries, but the problem of poverty is more common in developing countries. One of the reasons for the problem of poverty in developing countries is that development conditions in developing countries are still unstable. To overcome this, the government implements a fiscal decentralization policy with a village fund program which is expected to be able to reduce poverty.*

Metode: *The priorities for using village funds include village development and village community empowerment, for this reason the purpose of this study is to analyze the effect of the realization of village funds used in the field of village development and in the field of village community empowerment in every village in Pemalang Regency in 2019 to 2020. Secondary data by using the selected Fixed Effect (FE) method, the dependent variable used in this paper is village poverty and two independent variables, namely the realization of village funds in the field of village development and the realization of village funds in the field of empowerment of rural communities with the research population of all villages in Pemalang Regency. This uses purposive sampling method to determine the sample used in the paper.*

Hasil: *The results of this indicate that the independent variable simultaneously has no effect on village poverty, while partially the variable realization of village funds in the field of village development has a negative value with a coefficient value of -0.362448 and a probability value of 0.0824 which means the realization of village funds in the field of village development.*

Originalitas: *It has an effect on reducing the amount of village poverty but is not significant, while the realization of village funds in the field of village community empowerment has a partially negative significant effect on rural poverty with a coefficient value of -0.358970 and a probability value of 0.0000 which means that each the addition of 1 million realizations in the field of village community empowerment was able to reduce the number of poor people by 36 people.*

Keywords: *Village Poverty, Fiscal Decentralization, Village Development, Village Community Empowerment*

PENDAHULUAN

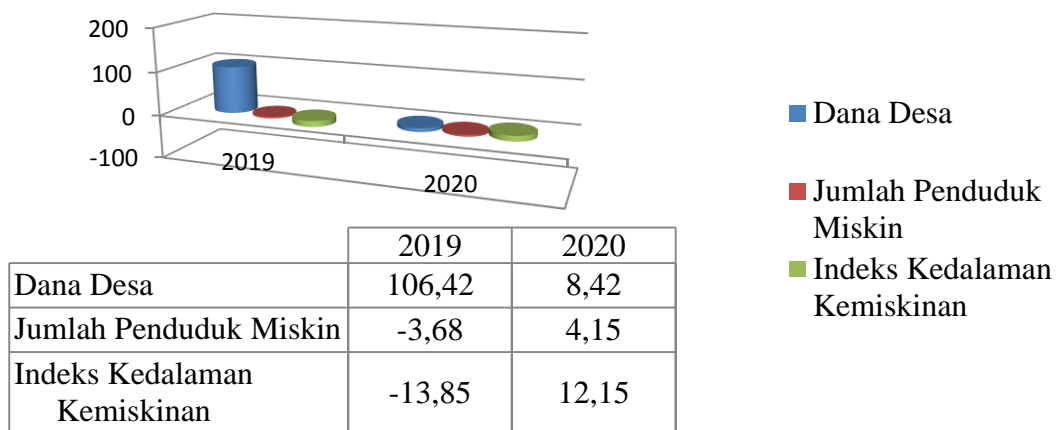
Masalah kemiskinan menjadi perhatian utama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Wilayah perdesaan di Indonesia merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Jumlah masyarakat miskin di pedesaan pada tahun 2019 berjumlah 15.150.000 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 15.260.000 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan membuat pemerintah harus memiliki kebijakan yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di pedesaan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan transfer dana desa dari

pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah melakukan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai salah satu upaya untuk melakukan pembangunan dari daerah.

Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berupaya menurunkan angka kemiskinan terutama untuk wilayah perdesaan dengan meluncurkan program dana desa. Program dana desa dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang sesuai dengan kewenangan desa, untuk memberikan petunjuk penggunaan dana desa, Pemerintah Pusat memberikan petunjuk dengan membuat program prioritas penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa antara lain dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan maskarakat desa (Buku Pintar Dana Desa, 2019).

Kabupaten Pemalang merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak kedua di kawasan Eks Karesidenan Pekalongan setelah Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.305.708 jiwa di tahun 2020 dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 209.000 jiwa. Kabupaten Pemalang memiliki trend pertumbuhan ekonomi yang positif tetapi indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan pada tahun 2020.

Gambar 1.
Perbandingan Perubahan Dana Desa, Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2020 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Februari 2021

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat jika pada tahun 2019 dana desa di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan sebesar 106,42 persen dari tahun sebelumnya, dimana pada saat tahun yang sama jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 3,68 persen dan indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan sebesar 13,85 persen. Sedangkan pada tahun 2020 dana desa mengalami kenaikan sebesar 8,42 persen tetapi jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 4,15 persen dan indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12.15 persen. Dimana pada tahun 2020 di Kabupaten Pemalang pengalokasian dana desa mengalami kenaikan tetapi jumlah penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan.

Dana desa salah satunya diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada bidang pembangunan desa, dimana dalam bidang pembangunan desa terdapat berbagai sub bidang yakni sub bidang kesehatan, sub bidang pendidikan, sub bidang PU dan Penataan Ruang, sub bidang kawasan dan pemukiman serta sub bidang hubkominfo. Kegiatan kesehatan yang menjadi kewenangan desa adalah kegiatan posyandu yang diadakan oleh masing-masing desa, dan kegiatan di sub bidang pendidikan yang dapat dibiayai oleh dana

desa adalah PAUD dan TK/RA/BA. Sedangkan kegiatan pada sub bidang PU dan penataan ruang menjadi penting dalam upaya menurunkan jumlah masyarakat miskin, hal ini dikarenakan infrastruktur sebagai salah satu roda penggerak perekonomian dan mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan perekonomian daerah. Menurut Tim LPEM-PSEKP-PSP dalam Wibowo (2014) salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang cukup efektif adalah dengan melalui pembangunan infrastruktur. Selain itu infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses ke lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata (Atmaja dan Mahalli, 2015).

Selain itu dana desa juga diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, dimana dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa terdapat sub bidang pertanian dan perikanan. Berdasarkan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2019 dan 2020, dana desa diprioritaskan untuk pemulihan perekonomian desa dan pengembangan sektor prioritas. Salah satunya untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan, untuk sektor ini dana desa dapat dipergunakan untuk pemberdayaan sektor usaha pertanian dan program ketahanan pangan dan ketahanan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, peternakan di desa, termasuk peternakan sapi. Penduduk di Kabupaten Pemalang mayoritas bermatapencaharian dibidang pertanian dan perikanan. Berdasarkan data potensi desa yang di terbitkan oleh BPS Kabupaten Pemalang dapat dilihat mayoritas matapencaharian penduduk Kabupaten Pemalang :

Tabel 1.
Banyaknya Desa menurut sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2020

Kecamatan	Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan Besar/Eceran
Moga	8	-	2
Warungpring	6	-	-
Pulosari	12	-	-
Belik	12	-	-
Watukumpul	15	-	-
Bodeh	19	-	-
Bantarbolang	17	-	-
Randudongkal	17	-	1
Pemalang	16	-	4
Taman	14	2	3
Petarukan	20	-	-
Ampelgading	16	-	-
Comal	15	1	2
Ulujami	18	-	-

Sumber: Statistik Potensial Desa Kabupaten Pemalang, 2020.

Matapencaharian masyarakat desa di Kabupaten Pemalang sebagian besar dalam bidang pertanian, dimana hanya ada dua desa di Kecamatan Taman dan satu desa di Kecamatan Comal yang masyarakatnya bermatapencaharian di bidang industri pengolahan dan untuk bidang perdagangan besar/eceran hanya terdapat di Kecamatan Moga, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman dan Kecamatan Comal.

Masih tingginya angka kemiskinan desa di Kabupaten Pemalang apakah dipengaruhi oleh pengalokasian dana desa untuk bidang pembangunan desa dan pengalokasian dana desa untuk bidang pemberdayaan desa. Berdasarkan teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak

adanya pembangunan pada masa itu, tetapi kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dimasa yang akan datang. Salah satu faktor sebagai penyebab timbulnya lingkaran setan kemiskinan adalah adanya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal (Arsyad,2015). Pada salah sisi, pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan pada satu sisi lain pembentukan modal dipengaruhi oleh ada tidaknya faktor pendorong investasi. Di negara berkembang kedua faktor tersebut tidak memungkinkan untuk terjadinya tingkat pembentukan modal yang tinggi.

Masih tingginya kemiskinan pada masyarakat desa menjadikan pemerintah meluncurkan kebijakan yang membuat masyarakat tidak hanya sebagai subjek tetapi juga sebagai objek dalam kebijakan tersebut. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah melakukan desentralisasi fiskal dengan melakukan transfer langsung kepada pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menurunkan jumlah masyarakat miskin di wilayah pedesaan.

Atas dasar regulasi serta data dengan berbagai masalah dan kondisi yang ada di Kabupaten Pemalang maka dilakukan kajian tentang bagaimana pengaruh dana desa yang digunakan dalam bidang pembangunan desa dan dana desa yang digunakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa terhadap kemiskinan desa. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyebutkan jika dana desa memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kemiskinan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Desentralisasi Fiskal

Menjelaskan masalah desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dengan konsep desentralisasi secara umum yang didalamnya menyangkut masalah administrasi dan politik. Oleh karena itu mendefinisikan desentralisasi fiskal akan selalu berkaitan satu sama lain ketiga hal tersebut, dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan desentralisasi, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi politik merupakan tonggak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara desentralisasi administrasi merupakan instrument untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrasi melalui pelimpahan kewenangan di bidang fiskal (Mardiasmo,2009:563).

Secara prinsipil ketiga jenis desentralisasi tersebut semua menekankan pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah, diikuti oleh pembiayaan dari pemerintah pusat. Maka dari itu desentralisasi dapat dimaknai sebagai gambaran sejauh mana kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah untuk mampu mengambil keputusan sendiri yang mengikat beberapa kebijakan pada ruang lingkup pemerintahan daerah (Litvack et. al, 1998:8). Mencermati ketiga jenis desentralisasi penjabarannya cukup luas, maka uraian selanjutnya lebih fokus mengkaji masalah desentralisasi fiskal. Dimana desentralisasi fiskal salah satu instrument kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah lainnya, disertai perbaikan pelayanan publik, efisiensi pemanfaatan sumber daya, disamping itu untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam tataran lebih aplikasi, desentralisasi fiskal sebagai pelimpahan kewenangan pengelolaan potensi ekonomi dan sumber lainnya di daerah, namun tetap disertai transfer dari pemerintah pusat. Besarnya transfer dana ke daerah dan kemungkinan peningkatan penerimaan diharapkan memiliki korelasi yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih tepat sasaran, intervensi dari pemerintah ditingkat atas relatif minim, sehingga daerah lebih mandiri mengambil keputusan.

Teori Transfer antar Tingkat Pemerintah

Perimbangan keuangan pusat dan daerah atau transfer antar tingkat pemerintah (*intergovernmental fiscal transfers*) merupakan salah satu bentuk hubungan yang umum dilaksanakan di banyak negara. Hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan menggambarkan hubungan keuangan diantara berbagai tingkat pemerintahan, yang meliputi berbagai aktifitas keuangan pemerintah seperti perpajakan, pengeluaran, pinjaman, subsidi, transfer dan hibah. Transfer fiskal antar tingkat pemerintahan terdiri atas hibah (*grants*), dan berbagai hasil (*revenue-sharing*) merupakan sumber penerimaan yang paling dominan bagi tingkat pemerintahan daerah di banyak negara sedang berkembang. Dimana desain dari transfer tersebut memiliki pengaruh terhadap efisiensi dan keadilan atau pemerataan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah. Atas dasar itu maka diperlukan desain transfer untuk menentukan keberhasilan desentralisasi fiskal (Litvack, et.al. 1998:12).

Ma (1997: 4-5) menyebutkan bahwa model *intergovernmental fiscal transfer* pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Model alokasi transfer yang mempertimbangkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*).
2. Model alokasi transfer berdasarkan pertimbangan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) antar daerah.
3. Model alokasi transfer yang didasarkan atas berbagai indikator “kebutuhan”.
4. Model alokasi transfer berdasarkan kesamaan basis pajak per kapita.

Sementara itu, menurut Ma (1997:5-6), Shah (1994:37-40), Shah (2006:4-5), dan Rosen (2008:530) pada dasarnya ada dua *intergovernmental transfer* yaitu;

1. Hibah bersyarat (*Conditional grant*)
2. Hibah tidak bersyarat (*unconditional grants*)

Teori Transfer dan Pengalokasian Dana Desa

Sejak tahun 2015, jenis transfer ke daerah bertambah selain Dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan ke Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat, yakni Transfer Dana Desa sebagai konsekuensi lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika dilihat dari kriteria dan jenis transfer maka transfer Dana Desa (DD) termasuk dalam jenis transfer dengan tujuan umum karena sifatnya *unconditional*. Demikian juga peruntukannya tidak dirinci oleh pemerintah pusat, hanya dijelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. apabila mangacu pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa memiliki formulasi perhitungan lebih mirip dengan DAU, adapun formulasi perhitungan Pengalokasian Dana Desa sebagai berikut:

$$DD Kab = AD Kab + AA Kab + AK Kab + AF Kab$$

Dimana:

- DD Kab : Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
AD Kab : Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten
AA Kab : Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten
AK Kab : Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten
AF Kab : Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten

Dana Desa dihitung berdasarkan perhitungan bobot variabel sebagai berikut; Luas wilayah Desa (20%), Jumlah Penduduk Desa (30%), Angka Kemiskinan Desa (50%) dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa (berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis Desa/ IKG dari Kantor BPS Pusat) sebagai pengali/penyesuaian. Formula ini digunakan untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar desa, baik dalam satu kabupaten maupun antar kabupaten atau provinsi. Tentu saja bahwa formula ini akan menghasilkan pembagian DD setiap desa berbeda jumlah yang didapatkan, karena masing-masing desa memiliki bobot yang berbeda dan jenis kebutuhannya.

Teori Kemiskinan

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan pada masa itu, tetapi kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara miskin” (*A country is poor because is poor*). Salah satu faktor sebagai penyebab timbulnya lingkaran setan kemiskinan adalah adanya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal (Arsyad, 2015). Pada satu sisi, pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan pada satu sisi lain pembentukan modal dipengaruhi oleh ada tidaknya faktor pendorong investasi. Di Negara berkembang kedua faktor tersebut tidak memungkinkan untuk terjadinya tingkat pembentukan modal yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat miskin disetiap desa di Kabupaten Pemalang tahun 2019-2020. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yakni realisasi dana desa di bidang pembangunan desa dan realisasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa. realisasi dana desa di bidang pembangunan desa adalah pengeluaran pemerintah desa di bidang pembangunan desa selama periode tahun 2019-2020 yang bersumber dari Pagu Dana Desa masing-masing desa di Kabupaten Pemalang yang digunakan untuk membiayai beberapa sub bidang kegiatan di Bidang Pembangunan Desa seperti sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang PU dan Penataan Ruang, sub bidang kawasan dan pemukiman serta sub bidang hubkominformo. Sedangkan realisasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah pengeluaran pemerintah desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa selama periode tahun 2019-2020 yang bersumber dari Pagu Dana Desa masing – masing desa di Kabupaten Pemalang yang digunakan untuk membiayai beberapa sub bidang kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa seperti sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, sub bidang PPPA dan keluarga dan sub bidang dukungan penanaman modal.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan antara data runtut waktu dari periode 2019 hingga 2020 dan data silang yang meliputi 203 desa di Kabupaten Pemalang. Semua data yang digunakan diperoleh melalui publikasi Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Metode Analisis

Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan metode Fixed Effect untuk mengetahui pengaruh realisasi dana desa di bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan desa. Model dasar penelitian ini adalah:

$$Y_{kmn} = f(X_{RPB}, X_{RPM},)$$

Y_{kmn} = Proporsi jumlah penduduk miskin setiap desa di Kabupaten Pemalang (Jiwa)

X_{RPB} =Realisasi dana desa di bidang pembangunan desa di setiap desa di Kabupaten Pemalang (Rupiah)

XRPM = Realisasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa (Rupiah)

Model dasar diturunkan menjadi model ekonometrika sebagai berikut :

$$Y_{kmn} = \beta_0 + \beta_1 X_{RPB} + \beta_2 X_{RPM} + \mu t$$

Dimana :

$\beta_0, \beta_1, \dots, n$ merupakan parameter estimasi

μt merupakan Error term (variabel yang tidak terkorelasi).

Dalam model ini terdiri dari variabel independen (bebas) yang terdiri dari realisasi dana desa di bidang pembangunan desa dan realisasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan sebagai variabel dependen adalah tingkat kemiskinan di setiap desa di Kabupaten Pemalang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pemalang dengan jumlah populasi penelitian sebanyak 211 desa, setelah dilakukan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling didapatkan sampel penelitian sebanyak 203 desa dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan derajat keyakinan 5% ($\alpha : 0,05$). Sebelum dilakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji normalitas terhadap data dan didapatkan bahwa data memiliki distribusi normal dengan nilai probabilitas $P = 0,116$ dimana nilai $P > 0,05$.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan realisasi dana desa di bidang pembangunan desa dan realisasi di bidang pemberdayaan masyarakat desa terhadap kemiskinan masyarakat desa dalam kurun waktu 2019-2020. Hasil perhitungan dengan analisis regresi menunjukkan bahwa realisasi dana desa di bidang pembangunan desa bernilai negatif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin desa dan untuk realisasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan desa, sedangkan secara simultan kedua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irma Setianingsih (2012) yang menyatakan jika dana desa untuk pembangunan desa memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kemiskinan desa yang dilakukan di Kabupaten Melawi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel realisasi dana desa di bidang pembangunan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Pemalang. Hasil ini menggambarkan jika program posyandu, pendidikan untuk anak usia dini serta program pembangunan desa lainnya belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan desa. Variabel realisasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan pengaruh yang signifikan negatif dengan nilai koefisien sebesar -0,358970 dengan probabilitas 0,0000 yang artinya peningkatan 1 juta realisasi dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa mampu mengurangi jumlah penduduk miskin desa sebesar 36 jiwa. Hasil ini menggambarkan jika Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui program pemberdayaan masyarakat mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan desa di Kabupaten Pemalang pada tahun 2019-2020.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut Realisasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat menunjukan hasil signifikan negatif terhadap kemiskinan desa sehingga pemerintah desa dapat menggunakan dana desa semaksimal mungkin dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yang

akhirnya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin desa, melalui beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan masing-masing desa dan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel realisasi penggunaan dana desa disetiap sub bidang kegiatan, yang mana dapat menggambarkan penggunaan dana desa dalam setiap kegiatan secara jelas sehingga hasil penelitian jauh lebih baik. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk memasukkan variabel baru yang termasuk dalam 5 bidang yang dapat dibiayai menggunakan dana desa sesuai dengan kewenangan masing-masing desa. selain itu penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan periode waktu untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2015). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Atmaja HK, M. K. (2015). *Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sibolga*. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(4).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. (2019). *Statistik Potensi Desa Kabupaten Pemalang*. <https://pemalangkab.bps.go.id>. Diakses tanggal 25 Juli 2021
- . (2020). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah*. <https://www.bps.go.id>. Diakses tanggal 25 Juli 2021
- . (2020). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Persen), 2019-2020*. In [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id). Diakses tanggal 25 Juli 2021
- Kementerian Keuangan RI. (2019). *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Litvack, J., Ahmad, J. & Bird, R. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. The World Bank, Washington.D.C.
- Ma, J. (1997). *Intergovernmental Fiscal Transfer; A Comparison of Nine Countries (Case of United States, Canada, The United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, India and Indonesia)*. The World Bank.
- Mardiasmo. (2009). *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005 – 2008*. dalam Abimanyu dan Megantara, (ed): *Era Baru Kebijakan Fiskal*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Rosen, H. (2008). *Public Finance*, 5th edition, Illinois, Richard d. Irvin, Inc.
- Shah, A. (1994). *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economics*". Washington D.C., The World Bank.
- . (2006). *A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfer*. World Bank Policy Research Working Paper 4039, October.
- Wibowo, M. E. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah)* (Universitas Diponegoro). Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/44748/1/04_WIBOWO.pdf. Diakses tanggal 15 Maret 2019.